

Masyarakat, Kebudayaan dan Politik

Daftar Isi

Arkeometalurgi pada Enam Jenis Logam yang Berpengaruh pada Peradaban Umat Manusia	
Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun dan Tjokorda Gde Tirta Nindhia	1–5
Otonomi Negara dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Implementasi Politik Kekuasaan Pusat dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah	
Asrinaldi Asril, Mohammad Agus Yusoff	6–16
Sosial dan Kebudayaan Kelompok “Batin Sembilan” di Provinsi Jambi	
Mat Syuroh	17–23
Kontestasi Wacana <i>Civil Society</i>, Negara, dan Industri Penyiaran dalam Demokratisasi Sistem Penyiaran Pasca-Orde Baru	
Henry Subiakto	24–34
Minimalisasi Konflik antar-Etnis di Kepulauan Timur Madura Melalui Media Rakom	
Surokim dan Tatag Handaka	35–44
Remaja Nangroe Aceh Darussalam Pasca-Tsunami	
Nurul Hartini	45–51
Saling Hubungan antara Lingkungan Eksternal dan Lingkungan Internal Perkumpulan Petani Pemakai Air	
Syamsir Torang	52–60
Perempuan dalam Perspektif Sosial dan Keluarga: Kajian terhadap Novel Mutakhir Perempuan Indonesia	
Sulaiman	61–67
Tingkat Adopsi terhadap Diversifikasi Pangan Berbasis Jagung pada Organisasi Kelompok Masyarakat di Provinsi Lampung	
Fitriani, Saroni, dan Yatim R. Widodo	68–73
Mekanisme <i>Survival</i>, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM	
Bagong Suyanto	74–83

Mekanisme *Survival*, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin dalam Masa Kritis Akibat Kenaikan Harga BBM

Bagong Suyanto¹

Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Various studies had shown that the life of coastal communities, especially families of fishers were related to the problem of poverty and socio-economic disparities. This study aimed to map the root causes of poverty, assess the problematic situation faced and survival mechanisms developed by the poor fisher families after the fuel price increase. This research also aimed to formulate the model and the strategy of empowering coastal communities and accelerating poverty reduction program for the families of poor fishermen in East Java province. This research was conducted at four coastal areas--Tuban, Sampang, Trenggalek, and Probolinggo. The study found that when fuel prices went up, followed by the increased production costs for operations at the sea, the fishers' benefits decreased, while the competitors increased in number. Sooner or later they had capital erosion. Their savings that could be used as reserve capital and operational costs kept decreasing slowly in order to meet the needs of daily life that continued to increase. There were two ways to improve the living standards and to provide opportunities for the poor fishers. First, was to encourage a shift in the status of traditional fishers into modern fishers. Second, they might be using "traditional" means but facilitate them to be more empowered and to have the ability to buffer the economy, and to be flexible enough to overcome the pressure of economic crisis.

Key words: *poor fisher, modern fisher, traditional fisher, modernization of fishery, capital erosion*

Kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat pesisir, khususnya di kalangan nelayan tradisional, hal ini merupakan salah satu masalah serius yang harus menjadi perhatian dan tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, tidak terkecuali di Provinsi Jawa Timur. Ketika situasi krisis ekonomi merambat ke berbagai wilayah dan harga solar naik, tidak sedikit masyarakat di daerah pesisir yang terancam kolaps karena tidak kuat menanggung tekanan kebutuhan hidup dan kenaikan biaya produksi.

Berbagai studi telah banyak membuktikan bahwa kehidupan masyarakat pesisir, khususnya keluarga nelayan tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi (antara lain Andriati 2008). Dibandingkan dengan kelompok masyarakat miskin lain di desa pertanian atau perkampungan-perkampungan kumuh (*slum*) di daerah perkotaan, tekanan yang dialami keluarga nelayan miskin, buruh nelayan, nelayan kecil, atau nelayan tradisional relatif lebih mendalam. Menurut Khudori (2009), beberapa faktor yang menjadi penyebab meluasnya

tekanan kemiskinan yang dialami masyarakat nelayan adalah:

Pertama, karena kuatnya tekanan-tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam membangun sub-sektor perikanan. Tinjabbate (2001, dalam: Khudori, 2009) membuktikan, akibat kebijakan pembangunan perikanan yang cenderung hanya mengedepankan untuk peningkatan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara, intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di Kecamatan Ampenan, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menjadi intensif, namun justru memarginalisasi kelompok nelayan miskin atau nelayan tradisional. Kepentingan nelayan tradisional menjadi terabaikan akibat perlakuan diskriminatif Pemda yang lebih mementingkan nelayan modern.

Kedua, ketergantungan yang berbentuk hubungan patron-klien antara pemilik faktor produksi (kapal dan alat tangkap) dan buruh nelayan. Sejumlah penelitian memperlihatkan, bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan, nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret ke dalam

¹ Korespondensi: Bagong Suyanto. Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga. Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60288. Telepon: (031) 5011744. E-mail: bagong_fisip@yahoo.com

kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan mengubah *mode of production* dari sistem tradisional jadi modern tidak terjadi. Hal ini karena proses yang terjadi tidak dibarengi pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional dan saling menguntungkan.

Ketiga, adanya fenomena kompradorisme dalam modernisasi alat tangkap nelayan. Ini ditandai dengan fragmentasi kegiatan nelayan dari homogen jadi beragam akibat intervensi kapital atas komunitas nelayan. Hal ini memunculkan formasi sosial baru, yaitu adanya buruh nelayan dan punggawa, serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri kemudian jadi upah yang diberikan juragan pemilik faktor produksi.

Berbeda dengan nelayan modern yang sering kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati tekanan perubahan dan kondisi *over fishing*, nelayan tradisional sering kali memang mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari program pembangunan dan modernisasi perikanan yang sifatnya a-historis. Akibat keterbatasan teknologi yang dimiliki, ruang gerak nelayan tradisional umumnya sangat terbatas: mereka hanya mampu beroperasi di perairan pantai (*inshore*). Kegiatan penangkapan ikan dilakukan dalam satu hari sekali melaut (*one day a fishing trip*) (Kusnadi 2003:86). Beberapa contoh nelayan yang termasuk tradisional adalah nelayan *jukung*, nelayan pancingan, nelayan udang, dan nelayan teri nasi.

Pasca diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM, nelayan tradisional boleh dikatakan adalah kelompok masyarakat pesisir yang paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial-ekonomi yang terkesan tiba-tiba, namun berkepanjangan. Bisa dibayangkan, apa yang dapat dilakukan nelayan tradisional untuk bertahan dan melangsungkan kehidupannya, jika dari hari ke hari potensi ikan di laut makin langka karena cara penangkapan yang berlebihan? Dengan hanya mengandalkan pada perahu tradisional dan alat tangkap ikan yang sederhana, jelas para nelayan tradisional ini tidak akan pernah mampu bersaing dengan nelayan modern yang didukung perangkat yang serba canggih dan kapal besar yang memiliki daya jangkauan yang jauh lebih luas.

Bagi nelayan tradisional, musim kemarau yang panjang bukan saja sama dengan memperlama masa kesulitan mereka dalam memperoleh hasil tangkapan, tetapi juga menyebabkan kehidupan mereka menjadi makin miskin, dan mereka terpaksa masuk dalam perangkap utang yang tidak berkesudahan. Keterbatasan kemampuan nelayan-

nelayan tradisional dalam berbagai aspek, khususnya penguasaan alat tangkap yang serba terbatas adalah hambatan potensial bagi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengatasi kemiskinan yang membelit mereka selama ini (Kusnadi 2003:98). Dalam banyak kasus, nelayan tradisional yang miskin umumnya lebih memilih menerima nasib dan berusaha beradaptasi dengan kondisi kemiskinan yang membelenggunya daripada berusaha menyiasatinya.

Studi sebagaimana dilaporkan bermaksud mengkaji situasi problematik yang dialami nelayan miskin, untuk kemudian merumuskan model pemberdayaan masyarakat nelayan yang benar-benar kontekstual dan efektif. Studi ini penting dilakukan, karena jumlah nelayan miskin dari tahun ke tahun ada kecenderungan terus bertambah, sehingga membutuhkan intervensi yang sifatnya segera.

Secara garis besar, tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah (1) memetakan akar penyebab kemiskinan, mengkaji situasi problematik yang dihadapi dan mekanisme *survival* yang dikembangkan masyarakat pesisir dan keluarga nelayan miskin di Provinsi Jawa Timur pasca diberlakukan kebijakan kenaikan harga BBM; (2) mengidentifikasi dan mengkaji kendala-kendala yang menghambat upaya perbaikan taraf kesejahteraan nelayan miskin di Provinsi Jawa Timur; dan (3) merumuskan model dan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dan program percepatan pengentasan kemiskinan bagi keluarga nelayan miskin di Provinsi Jawa Timur.

Metode Penelitian

Dalam studi ini bahan-bahan yang dibutuhkan dikumpulkan melalui tiga cara, pertama yaitu mengkaji dan menganalisis data sekunder mengenai kondisi kemiskinan di lingkungan daerah pesisir dan kondisi demografis penduduk Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Data sekunder yang dibutuhkan dicari dari BPS, dinas terkait, survei-survei lokal, dan data dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya.

Kedua, melakukan penggalian data primer ke lapangan untuk memperoleh gambaran yang valid dan akurat mengenai kondisi kemiskinan yang dialami keluarga nelayan miskin di 4 kabupaten yang menjadi sampel lokasi penelitian. Data primer ini digali dari keluarga-keluarga nelayan miskin.

Dalam penelitian ini, jumlah responden yang diwawancarai adalah 200 keluarga nelayan miskin, di mana untuk masing-masing kabupaten dipilih 50 responden sebagai sampel penelitian (Tabel 1).

Kriteria responden yang dipilih adalah (1) sudah berkeluarga dan memiliki anak minimal 1 orang; (2) termasuk nelayan miskin yang salah satu indikatornya adalah merupakan penerima BLT; (3) masih menggunakan alat tangkap ikan yang tradisional; dan (4) menekuni pekerjaan nelayan minimal dalam 5 tahun terakhir. Sengaja dalam penelitian ini dipilih keluarga nelayan miskin yang sudah bertahun-tahun menggantungkan kehidupannya dari usaha melaut, karena studi ini memang bertujuan untuk memahami situasi problematik yang mereka hadapi, khususnya pasca diberlakukannya kebijakan kenaikan harga BBM.

Tabel 1.
Lokasi Penelitian

Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jumlah Responden
Tuban	Tuban	Karang Sari	50
Sampang	Camplong	Camplong	25
		Tanjung	25
Trenggalek	Watulimo	Tasik madu	25
		Prigi	25
Probolinggo	Mayangan	Sukabumi	25
		Mayangan	25

Sumber: Suyanto (2009)

Ketiga, melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) tentang efektivitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di kalangan masyarakat desa pesisir, khususnya keluarga nelayan miskin. Wawancara mendalam ini penting dilakukan untuk menggali lebih jauh tentang efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di komunitas desa pantai di Jawa Timur. Permasalahan utama yang dicoba digali dari kegiatan wawancara mendalam ini adalah tentang mekanisme *survival* keluarga nelayan miskin, dan bagaimana respons mereka terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat pantai yang dikembangkan pemerintah belakangan ini. Jumlah

informan yang diwawancarai secara mendalam ditetapkan sebanyak 20 orang informan, baik yang berasal dari nelayan miskin itu sendiri, juragan kapal atau nelayan modern, tengkulak ikan, dan aparat pemerintah setempat. Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali masalah yang dihadapi masyarakat desa pesisir di tingkat komunitas.

Berdasarkan teknologi penangkapan ikan yang dipergunakan, orientasi pasar dan karakteristik hubungan produksi, menurut Satria (2002:28–29) yang namanya komunitas nelayan umumnya bisa digolongkan menjadi empat kelompok (Tabel 2). Pertama, *peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang biasanya bersifat subsisten, menggunakan alat tangkap yang masih tradisional seperti dayung, sampan yang tidak bermotor dan hanya melibatkan anggota keluarga sendiri sebagai tenaga kerja utama. Secara lebih rinci, ciri-ciri usaha nelayan tradisional: (1) teknologi penangkapan bersifat sederhana dengan ukuran perahu yang kecil, daya jelajah terbatas, daya muat perahu sedikit, daya jangkauan alat tangkap terbatas, dan perahu dilajukan dengan layar, dayung, atau mesin ber-PK kecil; (2) besaran modal usaha terbatas; (3) jumlah anggota organisasi penangkapan kecil antara 2–3 orang, dengan pembagian peran bersifat kolektif (non-spesifik), dan umumnya berbasis kerabat, tetangga dekat, dan atau teman dekat; (4) orientasi ekonomisnya terutama diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Kusnadi 2003:86).

Kedua, dengan berkembangnya motorisasi perikanan, nelayan pun berubah dari *peasant-fisher* menjadi *post-peasant fisher* yang dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju. Meski mereka masih beroperasi di wilayah pesisir, tetapi daya jelajahnya lebih luas dan memiliki surplus untuk diperdagangkan di pasar.

Ketiga, *commercial fisher*, yakni nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan.

Tabel 2.
Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha yang Ditekuni

Jenis Usaha	Orientasi Ekonomi dan Pasar	Tingkat Teknologi	Hubungan Produksi
Tradisional	Subsisten, rumah tangga	Rendah	Tidak hierarkhis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Post-tradisional	Subsisten, surplus, rumah tangga, pasar domestik	Rendah	Tidak hierarkhis, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen
Komersial	Surplus, pasar domestik, ekspor	Menengah	Hierarkhis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang homegen
Industri	Surplus, ekspor	Tinggi	Hierarkhis, status terdiri dari pemilik, manajer, dan ABK yang heterogen

Sumber: Satria (2002)

Skala usahanya sudah besar, yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang dipergunakan lebih modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun alat tangkapnya.

Keempat, *industrial fisher* yang memiliki ciri-ciri yaitu (1) diorganisasi dengan cara-cara yang mirif dengan perusahaan agroindustri di negara maju; (2) lebih padat modal; (3) pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana; dan (4) menghasilkan produk ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor. Nelayan berskala besar ini umumnya memiliki organisasi kerja yang kompleks dan benar-benar berorientasi pada keuntungan.

Bagi nelayan yang berskala besar dan memiliki teknologi penangkapan ikan yang sudah maju, mereka umumnya tidak banyak terpengaruh oleh irama musim. Berkat daya jelajah kapal-kapal yang dimiliki, mereka dapat mencari ikan di wilayah mana pun, sehingga secara sosial-ekonomi, baik pemilik maupun ABK kapalnya relatif sudah mapan. Hal ini berbeda dengan nelayan-nelayan tradisional yang modalnya kecil dan teknologinya sederhana.

Menurut Raymond Firth, karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin umumnya adalah (1) pendapatan nelayan bersifat harian (*daily increment*) dan jumlahnya sulit ditentukan. Selain itu, pendapatannya juga tergantung pada musim dan status nelayan itu sendiri, apakah sebagai juragan kapal atau pandega; (2) tingkat pendidikan nelayan maupun anak-anak nelayan umumnya rendah, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari pekerjaan alternatif; (3) sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan sering kali menimbulkan ketergantungan yang besar terhadap pedagang atau pengijon, sehingga menyebabkan harga ikan cenderung lebih dikuasai oleh pedagang atau pengijon; (4) kebutuhan investasi yang besar di bidang usaha perikanan, sering kali menyebabkan nelayan lebih memilih mereduksi risiko dan hanya bergerak di bidang perikanan secara kecil-kecilan; dan (5) keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.

Kusnadi (2003:19) membedakan faktor penyebab kemiskinan nelayan dalam dua kelompok. Pertama, sebab-sebab kemiskinan nelayan yang bersifat internal, mencakup: (1) keterbatasan kualitas sumber daya manusia nelayan; (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan; (3) hubungan kerja dalam organisasi penangkapan yang sering kali kurang menguntungkan buruh;

(4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan; (5) ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut; dan (6) gaya hidup yang dipandang boros, sehingga kurang berorientasi ke masa depan.

Kedua, sebab-sebab kemiskinan yang bersifat eksternal, mencakup: (1) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara; (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, praktik penangkapan ikan dengan bahan kimia, perusakan terumbu karang, dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir; (4) penggunaan peralatan tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan; (5) penegakan hukum yang lemah terhadap perusak lingkungan; (6) terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen; (7) terbatasnya peluang kerja di sektor non-perikanan yang tersedia di desa nelayan; (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun; dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Kemiskinan yang diderita masyarakat nelayan, menurut Kusnadi (2002:2) dengan demikian bersumber dari dua hal. Pertama, faktor alamiah, yakni yang berkaitan dengan fluktuasi musim-musim penangkapan dan struktur alamiah sumber daya ekonomi desa. Kedua, faktor non alamiah, yakni berhubungan dengan keterbatasan daya jangkauan teknologi penangkapan, ketimpangan dalam sistem bagi hasil dan tidak adanya jaminan sosial tenaga kerja yang pasti, lemahnya penguasaan jaringan pemasaran dan belum berfungsinya koperasi nelayan yang ada, serta dampak negatif kebijakan modernisasi perikanan yang telah berlangsung sejak seperempat abad terakhir ini.

Kebijakan modernisasi perikanan ini perlu digarisbawahi, karena tekanan kemiskinan dan terjadinya polarisasi sosial yang makin mencemaskan di lingkungan komunitas desa pantai sesungguhnya banyak dipicu oleh kebijakan seperti ini. Studi yang dilakukan Siahaan dan Singgih (1990), misalnya menemukan bahwa kebijakan negara tentang modernisasi perikanan (*blue revolution*) di kawasan pesisir utara Jawa Timur yang dicanangkan pada awal tahun 1970-an, telah memengaruhi secara signifikan kondisi sumber daya setempat. Kebijakan yang berorientasi ekspor dan hanya menekankan aspek peningkatan produktivitas ini telah mendorong perairan pesisir utara Jawa Timur

berada dalam situasi lebih tangkap (*overfishing*). Hasil yang relatif sama juga ditemukan Kusnadi ketika mengkaji kehidupan masyarakat nelayan di Jawa Timur. Kusnadi (2002), pada tahun 1979 jenis-jenis ikan demersal dan udang di perairan pesisir utara Jawa Timur sudah dieksploitasi secara penuh oleh nelayan-nelayan setempat. Di kawasan ini, tidak terjadi peningkatan produktivitas secara substantif. Demikian juga, kenaikan jumlah nelayan di kawasan ini juga tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tangkapan, tetapi justru meningkatkan tekanan penduduk terhadap sumber daya perikanan. Akibat kondisi demikian adalah semakin menyusutnya (kelangkaan) sumber daya yang tersedia (Kusnadi 2002:84).

Ringkas kata, kebijakan “revolusi biru” (*blue revolution*) yaitu kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap, telah mendorong timbulnya gejala lebih tangkap (*over fishing*) dan pengurasan sumber daya perikanan secara berlebihan di perairan pantai (*inshore*) maupun di perairan lepas pantai (*offshore*). Dalam mendapat hasil tangkapan, di antara nelayan dalam berbagai skala usaha akhirnya harus bersaing secara ketat. Hal yang memprihatinkan, kompetisi yang demikian ini pada akhirnya sering mengundang terjadinya bentrokan massal di kalangan nelayan, khususnya antara nelayan-nelayan tradisional dengan nelayan modern (Kusnadi 2002:11).

Selama seperempat abad kebijakan modernisasi perikanan dilaksanakan, tingkat kesejahteraan hidup nelayan boleh dikata nyaris tidak banyak berubah secara substantif. Ironisnya yang terjadi justru sebaliknya, yakni makin melebarnya kesenjangan sosial-ekonomi antarkelompok sosial dalam masyarakat nelayan dan meluasnya kemiskinan. Studi yang dilakukan (Suyanto 1993, 2003) menemukan bahwa berbagai program intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya dalam bentuk program motorisasi ternyata sebagian justru melahirkan polarisasi sosial-ekonomi yang makin parah antara nelayan modern dan nelayan tradisional. Kendati harus diakui bahwa modernisasi di sektor perikanan secara kuantitas memang telah berhasil meningkatkan jumlah total tangkapan nelayan. Di sisi lain modernisasi perikanan itu sesungguhnya menimbulkan sejumlah masalah. Program motorisasi perahu nelayan, bukan saja mengakibatkan pengurasan ikan yang serius di daerah pesisir serta menyebabkan perahu layar tradisional mengalami penurunan yang cukup besar dalam tangkapan per perahu. Lebih dari itu, modernisasi perikanan

pada akhirnya juga semakin mempertegas jurang polarisasi antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Dalam penelitian yang dilakukan Suyanto terungkap ini bahwa adanya motorisasi telah menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak merata di antara nelayan, baik di antara nelayan tradisional dengan nelayan modern maupun di antara sesama nelayan itu sendiri. Adanya sistem harga yang dikendalikan tengkulak dan sistem bagi hasil yang menguntungkan nelayan pemilik acap kali juga menyebabkan terjadinya proses marginalisasi nelayan tradisional dan para pandega.

Beberapa persoalan pokok yang selama ini senantiasa dihadapi masyarakat nelayan adalah, pertama, apa yang dialami keluarga nelayan tradisional dan pandega pada dasarnya bukan sekadar kecilnya pendapatan, tetapi lebih dari itu adalah jerat lingkaran kemiskinan yaitu kemiskinan, kerentanan, ketidakberdayaan, terisolir dan lemah jasmani yang saling memilin. Di kalangan nelayan tradisional dan keluarga pandega umumnya terdapat kesejajaran dan keterkaitan antara kondisi kemiskinan yang diderita dengan tingkat kerentanan dan jerat lingkaran kemiskinan yang lain, seperti ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, dan tingkat isolasi. Pendapatan yang minimal acap kali menyebabkan keluarga nelayan tidak bisa hidup jauh-jauh dari batas *margin* kemiskinan dan sulit untuk mengembangkan usahanya. Keluarga nelayan tradisional dan pandega umumnya tidak bisa menabung sehingga karenanya cenderung rentan dan mudah *collapse* bila tiba-tiba ada kebutuhan mendadak atau musibah yang menimpa dan harus diatasi. Sakit misalnya, adalah salah satu musibah yang menurut nelayan dianggap memiliki dampak beruntun dan sangat memberatkan, terutama bila yang terkena musibah sakit adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga.

Kedua, posisi tawar-menawar nelayan terhadap para pedagang ikan atau tengkulak umumnya relatif lemah karena pasar yang oligopsoni dan sifat komoditas ikan nelayan yang rentan terhadap waktu. Akibat jumlah nelayan yang terlalu banyak dan daya tahan ikan yang cepat busuk, menyebabkan para pedagang atau tengkulak ikan mampu dengan leluasa mempermainkan harga. Persaingan yang terjadi di dalam kelompok nelayan sendiri acap kali membuat pedagang atau tengkulak ikan berhasil memperoleh dan menekan harga beli ikan hingga ke tingkat yang paling murah. Di sisi lain, jumlah pedagang atau tengkulak ikan yang relatif sedikit dan penguasaan terhadap jaringan pemasaran dari tingkat hulu hingga

ke hilir adalah beberapa faktor yang menyebabkan posisi tawar-menawar pedagang atau tengkulak ikan relatif lebih kuat daripada para nelayan.

Ketiga, di dalam suatu komunitas nelayan di mana basis sosial-ekonomi massa relatif tidak seimbang, adanya penetrasi teknologi perikanan modern justru akan menyebabkan terjadinya polarisasi sosial-ekonomi yang semakin parah. Terbukti dalam penelitian ini, bahwa penetrasi motorisasi perahu nelayan dan proses komersialisasi adalah faktor utama yang menyebabkan munculnya polarisasi sosial-ekonomi antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Keterbatasan modal dan teknologi acap kali menyebabkan kondisi ekonomi nelayan tradisional semakin lama semakin tertinggal bila dibandingkan dengan kehidupan nelayan modern. Nelayan modern umumnya memiliki dan menguasai jaringan perdagangan ikan tersendiri yang dari segi harga lebih menguntungkan daripada apa yang dialami nelayan tradisional. Banyak nelayan modern atau juragan kapal merangkap sebagai pedagang atau tengkulak ikan yang menampung penjualan ikan dari nelayan tradisional atau nelayan kecil lainnya. Di desa-desa nelayan, nelayan modern kebanyakan menjadi "tuan-tuan laut" yang merupakan elit-elit desa dan mereka secara sosial umumnya dihormati.

Keempat, penggunaan teknologi perikanan dalam proses penangkapan ikan menyebabkan bagian yang diterima kelompok pandega cenderung semakin menurun dan bahkan menyebabkan timbulnya ketergantungan pandega terhadap juragan kapal. Akibat kurang atau tidak menguasai keterampilan lain selain melaut, tidak dimilikinya modal yang cukup, dan karena membutuhkan pendapatan yang rutin, banyak buruh nelayan atau pandega pada akhirnya memiliki ketergantungan yang kuat dengan nelayan modern atau juragan kapal. Meskipun tidak semua, tetapi cukup banyak para pandega atau nelayan miskin umumnya terjerat utang budi atau utang uang dengan para juragan kapal, sehingga secara sosiologis posisi tawar-menawar (*bargaining position*) mereka cenderung lemah ketika berhadapan dengan para juragan kapal atau nelayan modern.

Kelima, bagi kelompok nelayan miskin, kerabat dan patron memiliki fungsi positif untuk mengeliminasi tekanan ekonomi atau masa krisis yang datang tiba-tiba dan tidak bisa diatasi secara mandiri. Mekanisme *survival* yang banyak dikembangkan keluarga nelayan miskin umumnya berpola konsentrik. Untuk mengatasi masa krisis atau tekanan ekonomi yang dialami, keluarga nelayan miskin pertama-tama selalu berusaha terlebih dahulu mengatasinya secara mandiri. Beberapa

usaha mandiri yang dilakukan biasanya adalah mengetatkan pengeluaran atau konsumsi sehari-hari dan mendayagunakan anggota keluarga baik itu anak maupun istri untuk ikut mencari penghasilan tambahan. Dalam rumah tangga nelayan miskin, kontribusi ekonomi perempuan yang bekerja sangat signifikan. Perempuan-perempuan yang terlibat dalam aktivitas mencari nafkah merupakan pelaku aktif perubahan sosial-ekonomi masyarakat nelayan (Kusnadi 2002:35).

Sejumlah Isu Prioritas

Nelayan miskin sesungguhnya adalah bagian dari komunitas masyarakat pesisir yang tergolong paling rentan, tidak berdaya, dan menjadi korban pertama yang paling menderita dari kebijakan modernisasi perikanan (*blue revolution*). Kehidupan sehari-hari keluarga nelayan miskin bukan hanya diwarnai dengan kemiskinan dan berbagai keterbatasan, tetapi juga nyaris tidak ada peluang atau kesempatan untuk melakukan mobilitas vertikal. Tidak dimilikinya modal yang cukup dan aset produksi yang memadai, sering kali menyebabkan mereka terpaksa hidup pas-pasan, atau bahkan kekurangan ketika musim paceklik akan tiba.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dalam penelitian ini beberapa temuan pokok yang perlu digarisbawahi dan mendapat perhatian serius. Pertama, nelayan miskin yang *notabene* adalah nelayan kecil, buruh nelayan dan nelayan tradisional pada dasarnya adalah kelompok masyarakat pesisir yang memiliki kerentanan ekonomi dan secara sosial relatif paling tertinggal. Nelayan miskin umumnya tidak atau kurang berpendidikan, miskin, dan memiliki anak dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga beban yang mesti ditanggung menjadi makin berat. Akibat keterbatasan teknologi dan aset produksi yang dimiliki, mereka umumnya hanya beroperasi di sekitar wilayah pantai (*inshore*), dan intensitasnya sangat terbatas, sehingga rata-rata penghasilan yang diperoleh sangat kecil.

Kedua, bagi keluarga nelayan miskin, usaha dari hasil melaut dalam banyak hal tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, bahkan termasuk kebutuhan dasar anggota keluarga, khususnya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan seluruh anggota keluarga. Ibarat orang yang selalu "gali lubang, tutup lubang", kehidupan sehari-hari keluarga nelayan tradisional sebagian besar tidak terlepas dari perangkap utang. Musim paceklik dan makin berkurangnya sumber daya laut di wilayah sekitar pantai adalah kondisi yang

sering kali menyebabkan kehidupan sehari-hari nelayan miskin terpuruk. Sekalipun dengan pola kehidupan yang subsisten, keluarga nelayan miskin relatif masih bisa memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Peluang untuk terus mempertahankan dan mengembangkan pola kehidupan yang subsisten makin kecil, karena kebutuhan konsumsi yang makin bervariasi.

Ketiga, di kalangan masyarakat miskin, seperti keluarga nelayan tradisional, nelayan kecil dan buruh nelayan, dampak kenaikan harga BBM di tahun-tahun yang lalu tampaknya masih terasa menjejaskan dan membuat banyak keluarga nelayan miskin yang kehidupannya makin rapuh, karena usaha yang ditekuni tidak lagi dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Imbas kenaikan harga BBM yang terjadi di tahun-tahun terdahulu, bukan saja menyebabkan pendidikan anak mereka terganggu dan membuat keluarga nelayan miskin itu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga menyebabkan usaha yang ditekuni mengalami kemunduran dan ujung-ujungnya menyebabkan utang yang ditanggung meningkat.

Keempat, bagi keluarga nelayan miskin, peran istri dan anak umumnya sangat strategis dan merupakan sumber penghasilan keluarga yang penting. Hasil tangkapan ikan yang cenderung tidak menentu dan sering kali pula paceklik, menyebabkan peran istri dan anak yang bekerja di sektor publik mampu memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang makin membebani. Di lingkungan desa pantai, baik anak laki-laki maupun anak perempuan sudah biasa turut aktif bekerja membantu orang tuanya, bahkan terkadang dalam usia yang tergolong dini. Anak laki-laki biasanya ikut melaut ketika tidak sekolah atau membantu mengangkut ikan hasil tangkapan dari perahu ke daratan. Selain itu anak laki-laki biasanya juga terlihat meminta ikan kepada nelayan yang baru saja datang dari laut. Biasanya nelayan yang menjadi tempat meminta anak-anak adalah nelayan yang masih ada hubungan kerabat. Ikan-ikan pemberian nelayan ini kemudian dijual di pasar sehingga mendapatkan sedikit tambahan uang.

Kelima, bagi nelayan miskin, ketika harga BBM naik yang kemudian diikuti dengan meningkatnya biaya produksi untuk operasional melaut, ternyata di saat yang sama justru berbanding terbalik dengan keuntungan yang diperoleh. Sebagian besar nelayan miskin umumnya mengaku jumlah tangkapan ikan dan keuntungan yang diperoleh cenderung turun, sementara jumlah saingan justru semakin bertambah, sehingga cepat atau lambat mereka mengalami apa

yang disebut proses pengikisan modal. Tabungan yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan modal usaha untuk biaya operasional pelan-pelan berkurang karena terpaksa harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melonjak naik.

Keenam, upaya atau kiat yang dikembangkan keluarga nelayan miskin untuk tetap dapat bertahan hidup adalah mengembangkan perilaku subsistensi, melakukan penambahan jam kerja, melakukan pengetatan konsumsi dan melakukan efisiensi dengan cara mendayagunakan tenaga kerja keluarga sendiri, tetapi hanya sebagian kecil nelayan miskin yang mencoba melakukan dan mengembangkan diversifikasi usaha.

Ketujuh, dengan melihat kondisi sumber daya laut yang makin tidak ramah kepada nelayan tradisional dan nelayan kecil, mereka sesungguhnya telah menyadari pentingnya melakukan diversifikasi usaha, terutama di luar sektor perikanan. Berbagai keterbatasan yang dimiliki dan juga mempertimbangkan kondisi perekonomian yang tengah lesu, maka sebagian besar nelayan miskin umumnya mencoba berusaha bertahan hidup dari pekerjaan yang ditekuni dan diwarisi dari generasi ke generasi, meski mungkin dari segi penghasilan yang diperoleh cenderung pas-pasan atau bahkan kekurangan.

Kedelapan, kemampuan nelayan miskin untuk melakukan diversifikasi usaha umumnya rendah. Di sisi lain, peluang atau kesempatan kerja yang tersedia di luar sektor perikanan umumnya juga tidak terlalu menggembirakan dan tidak sesuai dengan karakteristik nelayan tradisional yang sebagian besar kurang atau tidak berpendidikan. Kemungkinan nelayan miskin untuk membuka usaha sendiri dalam banyak hal terkendala faktor modal. Tidak dimilikinya tabungan yang cukup dan rendahnya akses mereka terhadap sumber-sumber permodalan yang berbunga ringan, menyebabkan nelayan miskin pada akhirnya mencoba bertahan hidup dari pekerjaan lama yang ditekuninya, sekadar bertahan dan memperpanjang daya tahan, tetapi tidak berdaya untuk keluar dari situasi kemiskinan yang membelenggunya. Studi ini menemukan, meski nelayan miskin umumnya memiliki waktu luang yang cukup leluasa untuk mencari pekerjaan alternatif, tetapi kendala yang menghambat nelayan miskin melakukan diversifikasi usaha adalah keterbatasan modal yang dimiliki, tidak dikuasainya keterampilan alternatif, akses yang rendah pada jaringan pasar dan tidak dimilikinya koneksi yang memadai. Bahkan, jika ada bantuan dana dari pemerintah untuk pengembangan usaha

alternatif, disadari bahwa peluang mereka untuk mengembangkan usaha baru sangatlah terbatas karena tidak didukung kemampuan yang cukup.

Kesembilan, bagi nelayan miskin, salah satu peluang dan jalan keluar yang mereka butuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupannya adalah diberi kesempatan untuk memiliki alat tangkap yang lebih modern dan memiliki perahu atau kapal bermesin yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas areal jelajah mereka dalam mencari ikan di laut. Di samping itu, hal lain yang dibutuhkan nelayan miskin adalah upaya dan intervensi dari pemerintah untuk memberi perlindungan agar para nelayan miskin dapat memperoleh harga yang lebih adil dan sekaligus peluang bagi mereka untuk memberi nilai tambah atas ikan hasil tangkapan mereka agar tidak rentan waktu.

Model dan Strategi Pemberdayaan Nelayan Miskin

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan miskin agar dapat melakukan mobilitas vertikal, sesungguhnya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, adalah dengan cara mendorong pergeseran status nelayan tradisional atau nelayan kecil menjadi nelayan modern. Kedua, dengan cara tetap membiarkan nelayan miskin dalam status “tradisional”, tetapi memfasilitasi mereka agar lebih berdaya dan memiliki kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang kenyal terhadap tekanan krisis. Strategi pemberantasan kemiskinan struktural nelayan tradisional dapat dipetakan seperti pada Tabel 3. Beberapa jenis program ditawarkan untuk memberi kesempatan nelayan miskin berubah status menjadi nelayan modern, atau untuk memperkuat penyangga ekonomi dan posisi tawar nelayan miskin.

Pilihan mana yang diambil dari dua jalan di atas, sudah barang tentu sangat tergantung kepada kemampuan sumber daya pemerintah dan kondisi internal nelayan miskin yang bersangkutan. Pilihan apa pun yang bakal diambil, pertimbangan utama yang semestinya dijadikan dasar pengambilan keputusan adalah kepentingan dan nasib nelayan miskin itu sendiri sebagai subjek pembangunan. Berikut ini, beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan program pemberdayaan nelayan miskin.

Pertama, sejak awal harus disadari bahwa upaya pemberdayaan nelayan miskin tidak mungkin dilakukan hanya dengan cara mentransplantasikan

teknologi modern kepada kelompok nelayan tradisional itu secara *top-down*. Pemberdayaan nelayan miskin seyogianya mempertimbangkan dan bahkan harus bertumpu kepada keberadaan pranata sosial-budaya di masing-masing komunitas lokal nelayan tradisional. Dalam proses pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan nelayan miskin, misalnya akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan jika bertumpu kepada potensi sosial-budaya masyarakat setempat. Di kalangan nelayan miskin, studi ini menemukan bahwa organisasi penangkapan ikan yang berkembang di Jawa Timur umumnya bersifat sederhana dan personal, lebih banyak melibatkan anggota keluarga sendiri atau kerabat daripada bekerja dalam tatanan yang sifatnya impersonal. Program apa pun yang digulirkan atas nama program pemberdayaan masyarakat pantai atau masyarakat pesisir, khususnya nelayan miskin alangkah bijak jika dalam pelaksanaannya tidak mencoba membentuk kelompok-kelompok target di luar organisasi penangkapan ikan yang sudah sekian lama eksis.

Kedua, apa pun bantuan yang diberikan kepada kelompok nelayan miskin seyogianya tidak berorientasi pada kepentingan jangka pendek, sekadar menekankan pada kepentingan penguliran dana atau efisiensi pengembalian dana, tetapi harus lebih berorientasi pada pemupukan investasi sosial yang berjangka panjang dan bersifat strategis. Program bantuan modal yang berusaha memfasilitasi proses pemilikan aset produksi kepada nelayan miskin, pemupukan tabungan yang dapat memperkuat penyangga ekonomi keluarga nelayan miskin, dan sejenisnya adalah contoh-contoh program yang dapat dijadikan modal sosial oleh nelayan miskin.

Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan, bahwa pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk di kalangan masyarakat desa pesisir sering kali terbentur pada kendala administrasi dan target jangka pendek yang sering kali menafikan arti penting program yang investasi sosial yang hasilnya baru bisa dipetik dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Hasil studi yang dilakukan dewan pakar Jawa Timur (2008), misalnya, menemukan bahwa pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di berbagai kota/kabupaten di Jawa Timur acap kali tidak berjalan efektif, karena sikap pragmatis aparat birokrasi yang lebih cenderung memilih program yang populis daripada program yang memberdayakan masyarakat miskin secara nyata.

Tabel 3.
Strategi Pemberantasan Kemiskinan Struktural Nelayan Tradisional

Strategi	Tujuan	Program
Modernisasi nelayan miskin	Memberi kesempatan nelayan miskin berubah status menjadi nelayan modern	• Bantuan modal usaha • Bantuan teknologi modern alat tangkap ikan dan mesin perahu untuk memperluas daerah jelajah nelayan miskin • Pelatihan manajemen usaha perikanan • Modernisasi perikanan secara kooperatif
Revitalisasi nelayan miskin	Memperkuat penyangga ekonomi dan posisi tawar nelayan miskin	• Deversifikasi usaha non-perikanan • Pelatihan deversifikasi produk perikanan • Bantuan modal usaha dan kebutuhan konsumsi di musim paceklik melalui kelompok-kelompok lokal yang sudah terbentuk • Pemberdayaan perempuan dan anak keluarga nelayan miskin • Pemberdayaan kelompok nelayan miskin

Sumber: Suyanto (2009)

Ketiga, mencoba memberdayakan dan meningkatkan kadar kekenyalan, serta sekaligus mengurangi kadar kerentanan nelayan tradisional yang miskin dengan cara mendorong terjadinya proses deversifikasi hasil tangkapan dan deversifikasi usaha non-perikanan. Diketahui bahwa makin lama, areal penangkapan ikan nelayan tradisional makin terbatas akibat terjadinya *over fishing* dan keterbatasan teknologi penangkapan yang dimiliki. Dalam mencari sumber-sumber pemasukan substitutif, dua hal yang bisa dilakukan nelayan tradisional yaitu (1) mendorong terjadinya deversifikasi hasil tangkapan ikan dengan cara mengembangkan alat tangkap alternatif di luar kebiasaan yang selama ini mereka lakukan; dan (2) memfasilitasi proses deversifikasi usaha atau pencarian pekerjaan alternatif di ranah perekonomian darat, khususnya pada masa paceklik yang sering kali memberatkan kehidupan nelayan miskin.

Keempat, berusaha mengurangi kadar kerentanan keluarga nelayan miskin dengan cara meningkatkan daya tahan dan nilai tawar dari produk yang mereka hasilkan. Di satu sisi, benar bahwa pola subsistensi yang dikembangkan keluarga nelayan miskin akan dapat mengurangi kadar tekanan kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melambung, tetapi sebagian hasil tangkapan ikan yang lain akan lebih baik jika tidak dipasarkan dalam bentuk mentahan langsung sepulang dari melaut. Harga jual produk nelayan tradisional, niscaya akan lebih meningkat jika mereka dapat mengembangkan produk-produk alternatif yang berasal dari hasil pengolahan ikan mentah menjadi krupuk, petis, makanan alternatif, atau menjadi produk yang dapat dijadikan buah tangan warga masyarakat yang lain. Di samping itu, dengan memberi nilai tambah kepada produk hasil laut sesungguhnya juga akan bermanfaat untuk memperpanjang daya tahan hasil tangkapan ikan

nelayan miskin, sehingga di sisi yang bersamaan akan dapat meningkatkan posisi tawar nelayan karena produk tangkapan mereka tidak lagi rentan waktu.

Dalam mempersiapkan agar nelayan miskin dapat mengembangkan deversifikasi produk dan pengolahan terhadap ikan hasil tangkapan mereka, tentu yang dibutuhkan tidak sekadar bantuan modal usaha, tetapi juga pelatihan untuk memberikan bekal kepada mereka agar dapat mengembangkan produk-produk alternatif hasil olahan yang lebih tahan lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Kelima, bagaimana memutus mata rantai eksploitasi yang selama ini merugikan posisi nelayan tradisional. Caranya tidak semata-mata mengandalkan kebijakan regulatif dari pemerintah atau pemerintah daerah, tetapi yang utama harus bertumpu kepada pemberdayaan komunitas nelayan miskin itu sendiri sebagai sebuah kelompok sosial. Jika sebagai sebuah kelompok sosial, nelayan miskin mampu mengembangkan program-program mandiri yang dapat menjalankan fungsi sebagai garansi atau asuransi sosial jika anggotanya mengalami tekanan atau krisis. Musim paceklik, misalnya sering terjadi nelayan miskin menjadi korban jerat utang yang biasanya ditawarkan rentenir atau tengkulak yang ujung-ujungnya tidak memungkinkan nelayan tradisional menjual produk tangkapannya ke pihak lain meski harganya lebih menjanjikan. Jika dari nelayan tradisional itu sendiri bisa dibentuk kelompok sosial yang mampu menjalankan peran sebagaimana layaknya rentenir, tetapi dengan lebih manusiawi dan didukung solidaritas kelompok yang kuat, kemungkinan nelayan tradisional menjadi korban eksploitasi rentenir akan dapat dieliminasi.

Keenam, perlu disadari bahwa yang namanya nelayan atau komunitas desa pantai sebetulnya bukanlah kelompok yang homogen. Buruh nelayan,

nelayan kecil dan nelayan tradisional umumnya adalah golongan masyarakat pesisir yang berada pada lapisan sosial paling bawah, yang dalam banyak hal memiliki kadar kerentanan, ketidakberdayaan, kelemahan jasmani, kemiskinan, dan keterisolasian yang lebih parah dibandingkan nelayan modern. Dalam usaha mencegah agar program intervensi dan berbagai bantuan yang disalurkan tidak bersifat meritokratis (kelihatan di awal menghargai persamaan atau egaliter, tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak adil), oleh karena itu yang dibutuhkan adalah spesifikasi program, terutama program yang bertujuan untuk memberdayakan nelayan tradisional. Selain program-program yang bertujuan untuk perbaikan teknis dan manajemen usaha perikanan, yang tidak kalah penting bagi nelayan miskin adalah program pemberdayaan masyarakatnya atau program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia nelayan tradisional. Dalam jangka pendek, bahkan mungkin diperlukan kebijakan serta program-program yang lebih memihak, dan bertujuan memberikan perlindungan sosial kepada nelayan tradisional agar tidak menjadi objek eksploitasi kelompok sosial-ekonomi yang di atasnya.

Ketujuh, sebagai tindak lanjut dari program perlindungan dan pemberdayaan keluarga nelayan miskin melalui program pengembangan diversifikasi usaha, tahap berikutnya yang tak kalah penting untuk dikembangkan di lingkungan komunitas pesisir adalah bagaimana mendorong nelayan tradisional agar dapat lebih produktif, efisien dan lebih mampu berkompetisi di sektor perikanan atau sektor non-perikanan yang ditekuninya. Pada satu titik ketika nelayan tradisional sudah makin kenyal dan memiliki beberapa alternatif sumber penghasilan, maka ada baiknya jika dijajagi kemungkinan mendorong mereka untuk bekerja lebih profesional, dan pelan-pelan mulai mengakses perkembangan teknologi modern penangkapan ikan agar secara kuantitatif produktivitas kerja mereka dapat meningkat lebih pesat dan lebih besar.

Tahap awal, ada baiknya jika proses pelibatan nelayan miskin dalam kebijakan modernisasi perikanan dilakukan secara kooperatif di mana bantuan berbagai alat tangkap dan perahu yang lebih modern tidak sekadar diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan secara kolektif, tetapi yang terpenting bagaimana memastikan bahwa semua anggota kelompok itu juga dapat terlibat dan berperan serta secara langsung secara kooperatif.

Kedelapan, dalam rangka mempercepat upaya pemberdayaan nelayan miskin, ada baiknya jika pemerintah juga mengembangkan program pemberdayaan yang menempatkan dan memberi

kesempatan kepada perempuan dan anak dari keluarga nelayan miskin agar dapat lebih berperan terlibat dalam kegiatan produktif secara mandiri. Pengalaman selama ini telah banyak mengajarkan bahwa keterlibatan dan peran perempuan serta anak sebagai salah satu tiang penyangga ekonomi keluarga menjadi makin penting, sehingga sudah sewajarnya jika mereka diberi kesempatan untuk berkiper dalam ruang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya.

Simpulan

Dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan miskin agar dapat melakukan mobilitas vertikal, sesungguhnya ada dua jalan yang bisa ditempuh. Pertama, adalah dengan cara mendorong pergeseran status nelayan tradisional atau nelayan kecil menjadi nelayan modern. Kedua, dengan cara tetap membiarkan nelayan miskin dalam status “tradisional”, tetapi memfasilitasi mereka agar lebih berdaya dan memiliki kemampuan penyangga ekonomi keluarga yang kenyal terhadap tekanan krisis.

Daftar Pustaka

- Andriati, R (2008) Relasi kekuasaan suami dan isteri pada masyarakat nelayan. *Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 21(1):50–58.
- Khudori (2009) Nelayan, Kemiskinan dan Strategi Adaptasi. *Koran Tempo*, 12 Maret 2009.
- Kusnadi (2002) *Konflik Sosial Nelayan, Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS.
- Kusnadi (2002) *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnadi (2003) *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.
- Satria, A (2002) *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Siahaan, HM & Singgih, DS (1990) *Respons Struktural dan Kultural Terhadap Pembangunan Komunitas Nelayan Jawa Timur*. Kerja sama PAU Studi Sosial UGM dengan Universitas Airlangga.
- Suyanto, B (1993) *Dampak Motorisasi dan Komersialisasi Perikanan terhadap Perubahan Tingkat Pendapatan, Pola bagi Hasil dan Munculnya Polarisasi Sosial-Ekonomi di Kalangan Nelayan Tradisional dan Modern*. Kerja sama YIIS dan Toyota Foundation.
- Suyanto, B (2003) *Kajian Model Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Desa Pantai Madura dan Kawasan Selatan Jawa Timur*. Kerja sama Lemlit Unair dengan Baitbang Propinsi Jatim.
- Suyanto, B (2009) *Mekanisme Survival, Identifikasi Kebutuhan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin Dalam Mengatasi Masa Krisis Akibat Kenaikan Harga BBM*, Surabaya: LPPM Unair.